



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	//
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



EKARIANTO/PADEK

DISKUSI: BEM Unand berdialog dengan Ketua dan anggota DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim kemarin.

Kasus SPj Fiktif Disorot BEM Unand

Padang, Padek—Belasan perwakilan mahasiswa Unand yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendatangi DPRD Sumbar, kemarin (6/2). Mereka melakukan dialog dan diskusi dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Ketua Pansus tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan, Nurnas.

Presiden BEM, Faizil Putra didampingi Menteri Sospol Unand Jaka Perdana Irmel menyampaikan kegelisihan mereka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di lingkungan Dinas Prasjaltarkim Sumbar, sekarang Dinas PU/PR, (SPj Fiktif) dengan tersangka YSN. Kerugian negara ditotal mencapai Rp 63 miliar.

Mahasiswa ini melihat pengungkapan kasus ini terkesan lambat. Padahal kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Di sisi lain mahasiswa menilai

tidak mungkin ada satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Namun baru satu orang tersangka yang ditetapkan.

"Ini kasus yang besar, tapi kami melihat upaya pengungkapannya lambat," kata Jaka Perdana Irmel.

Dia mengatakan, BEM Unand juga mengikuti perkembangan kasus ini. Bahkan ini menjadi bahan diskusi bagi kalangan BEM. Mahasiswa meminta DPRD Sumbar untuk ikut mengawasi proses hukum kasus ini.

Mahasiswa ini juga mempertanyakan apa yang menjadi perhatian pansus tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan.

Menyikapi itu, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengapresiasi kepedulian mahasiswa ini. Apalagi yang menjadi sorotan itu adalah kasus yang merugikan Sumbar. Bagi Hendra, angka Rp 63 miliar itu bukanlah hal

yang kecil.

Hendra menyampaikan, DPRD tak bisa masuk terlalu jauh dalam kasus ini karena ini sudah masuk ranah hukum. Bahkan, informasi yang diterima DPRD Sumbar juga terbatas soal kasus ini. Meski begitu, dirinya tetap akan ikut memantau kelanjutan kasus ini.

"SPj fiktif ini sudah masuk ranah hukum. Makanya kita juga menunggu hasilnya. Tapi DPRD juga akan memantau kasus ini sesuai dengan tupoksi kedewanan," katanya.

Ketua Pansus Tata Kelola Pembangunan Daerah Nurnas menyebutkan, pansus tak hanya fokus pada kasus SPj fiktif saja. Namun lebih kepada mencegah terulangnya kasus serupa. Salah satunya memperkuat pengawasan dalam perencanaan kegiatan yang menggunakan dana APBD. **(eko)**